



## Media Massa dan Disintegrasi Bangsa

**Moh. Yamin Rumra**

Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia

Korespondensi penulis: [moh.yamin.rumra@iainambon.ac.id](mailto:moh.yamin.rumra@iainambon.ac.id)

**Abstract.** *This article was written to examine and analyze the impact of the role of the mass media on the potential problems of the disintegration of the Indonesian nation which have been quite widespread lately. This article was written on the basis that the mass media can play a dual role as a factor of integration and disintegration, amidst the growth of press freedom as a result of the growth of democracy and democratization in Indonesia. This research is qualitative research with library research as the main data collection technique. This study found that the potential of the mass media can play a role in strengthening integration in society but at the same time can be a factor in the occurrence of disintegration. This really depends on the tendency of the media itself, whether the media tends to be centrifugal or tends to be centripetal. If the media tends to be centrifugal, it will speed up the process of disintegration, likewise if the mass media tends to be centripetal then it can become an adhesive and strengthen national integration.*

**Keywords:** *Centrifugal, Disintegration of the Nation, Mass Media.*

**Abstrak.** Artikel ini ditulis untuk mengkaji dan menganalisis dampak dari peran media massa terhadap potensi masalah disintegrasi bangsa Indonesia yang cukup marak belakangan ini. Tulisan ini ditulis dengan dasar bahwa media massa dapat memainkan peran ganda sebagai faktor integrasi dan disintegrasi, ditengah suburkan kebebasan pers sebagai dampak dari pertumbuhan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan library research sebagai teknik pengumpulan data utama. Penelitian ini menemukan bahwa potensi yang dimiliki media massa dapat berperan memperkokoh integrasi dalam masyarakat tetapi juga sekaligus dapat menjadi faktor terjadinya disintegrasi. Hal ini sangat bergantung kepada kecenderungan media sendiri, apakah media cenderung sentrifugal ataupun cenderung sentripetal. Jika media cenderung sentrifugal, maka akan mempercepat proses disintegrasi, demikian juga jika media massa cenderung sentripetal maka ia mampu menjadi perekat dan memperkokoh kembali integrasi bangsa.

**Kata Kunci:** Disintegrasi Bangsa, Media Massa, Sentrifugal.

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah masalah disintegrasi bangsa (Supriyanto, 2011). Betapa tidak, setelah runtuhnya Orde Baru, bangsa ini diterpa badai diintegrasi yang sangat dahsyat. Timor Timur melepaskan diri dari pangkuan ibu pertiwi (Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI). Aceh minta merdeka, akhirnya diberi otonomi khusus. Papua sampai saat ini masih terus mengibarkan bendera bintang kejora.

Hipotesis atas persoalan ini pun bermunculan. Orang ekonomi memandang fenomena disintegrasi bangsa ini sebagai wujud ketidakadilan antara pusat dan daerah (Kadarisman, 2010). Kesenjangan antara pusat dan daerah menganga lebar. Daerah hanya dijadikan sapi perahan orang pusat. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin terlalu lebar. Maluku, Sulawesi dan Kalimantan siap siaga. Daerah-daerah ini disebut siap siaga, karena ada kecenderungan oleh pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang terkuras hanya untuk kepentingan asing

(Arisaputra, 2021), sementara warga negara kita di daerah-daerah tersebut tetap menjadi miskin. Akibatnya terjadi kecemburuan antara pusat dan daerah serta kecemburuan antara si miskin dan si kaya. Konsiderasi kecemburuan yang berlarur-larut seperti inilah memicu lahirnya disintegrasi.

Orang hukum melihatnya akibat kurang ditegakkannya supremasi hukum di tanah air (Umar, 2017). Hukum hanya dijadikan sebagai alat bagi penguasa. Ia bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan. Koruptor kelas kakap bebas berkeliaran di mana-mana, sementara orang tak bersalah dicarikan alasan untuk bisa menjadi teladan penegakan supremasi hukum, atau justru memperlakukakan hukum demi kekuasaannya. Fenomena seperti ini justru menimbulkan frustrasi sosial dan kebencian masyarakat di berbagai daerah terhadap pemerintah pusat. Tidaklah mengherankan jika kemudian mereka minta pisah dari pemerintah Indonesia dan mengurus dan menegakan hukum di wilayahnya sendiri.

Disintegrasi bangsa ini terjadi akibat pergesekan kepentingan politik dalam relasi kekuasaan (Nasution, 2007). Begitu kata orang politik. Mereka sengaja menebar benih-benih perpecahan antar masyarakat agar menimbulkan kesan tidak aman di berbagai persoalan di tanah air. Untuk itu, pemerintah harus segera mundur dan digantikan oleh yang lebih mampu mengendalikan berbagai gejolak di tanah air. Sementara mereka tidak sadar kalau pergeseran seperti itu bisa memicu disintegrasi sosial yang pada akhirnya akan bermuara pada proses disintegrasi bangsa.

Lantas, bagaimana orang komunikasi memandang persoalan disintegrasi ini? Adakah media massa punya kemampuan memperkokoh kembali integrasi bangsa yang terkoyak ini? Dalam tradisi ilmu komunikasi massa, media dipandang bak pisau bermata dua. Di satu sisi media dipandang dapat menyebarkan benih-benih disintegrasi bangsa. Namun di sisi yang lain ia juga mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *library research*, dimana peneliti menelusuri dan mengumpulkan data-data kepustakaan berupa buku dan artikel pada jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan teknik display dan reduksi data. Peneliti menentukan jenis dan bentuk data dalam matriks, kemudian melakukan pemilihan dan penyederhanaan data yang terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dan diinterpretasi sehingga menjadi data-data tersebut dapat memiliki makna sesuai dengan maksud penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Fungsi Media Massa

Harold Lasswell, seorang ahli komunikasi politik, mengumumkan tiga fungsi pokok komunikasi yaitu: (1) Pengawasan lingkungan, (2) korelasi antar bagian masyarakat dalam menanggapi lingkungan, dan (3) transmisi warisan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya (Cangara, 2009). Ketiga fungsi ini kemudian dilengkapi oleh Charles R. Wright dengan menambahkan satu fungsi lagi yaitu *entertainment* (hiburan) (Namira & Nuraeni, 2017).

Fungsi pengawasan, menunjukkan pengumpulan dan distribusi informasi mengenai kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan, baik di luar maupun di dalam suatu masyarakat tertentu. Salah satu konsekuensi positif dari fungsi ini ialah bahwa media massa memberikan peringatan mengenai ancaman dan bahaya yang berasal dari berbagai sumber (Fitriawan, 2017). Dengan adanya peringatan tersebut, masyarakat tentu akan bisa mempersiapkan diri atau berusaha mencegahnya. Konsekuensi positif yang kedua ialah arus data mengenai lingkungan merupakan alat bagi keperluan Lembaga masyarakat setiap hari, misalnya kegiatan di lantai bursa atau nilai mata uang, keadaan lalu lintas dan lain sebagainya.

Pengawasan media massa juga berfungsi bagi individu yaitu memberi informasi mengenai kejadian-kejadian rutin dan memberikan prestise kepada individu yang berusaha agar tetap tahu mengenai kejadian di sekelilingnya (Hendra, 2019). Ini bukan berarti bahwa setiap orang bergantung kepadanya. Dalam hal ini orang yang sesuai dengan penilaian ini meningkatkan prestise mereka di dalam kelompok atau masyarakat. Seringkali individu yang membaca berita-berita lokal dan nasional tertentu sering dimintai pendapat oleh orang lain yang kurang memahami berita tersebut, dan individu tersebut kemudian muncul sebagai pemuka pendapat (*opinion leader*) di masyarakatnya. Sementara orang-orang yang menaruh perhatian kepada kejadian-kejadian di dalam masyarakat pada umumnya seringkali bertindak sebagai '*cosmopolitan influentials*' (tokoh kosmopolit).

Dua orang ahli sosiologi, Paul Lazarsfeld dan Robert K. Merton, mengemukakan dua fungsi lain media massa yaitu fungsi penganugrahan status (*status conferral*) dan fungsi pengukuhan norma sosial atau mengalahkan (*ethicizing*) (Haryati, 2003; Muhazir, 2021). Penganugrahan status berarti bahwa berita yang melaporkan individu-individu sering kali meningkatkan prestise mereka. Dengan memfokuskan kekuatan media massa pada orang-orang itu suatu status public (*public status*) yang tinggi dari sinilah nilai tertinggi diletakkan pada aktivitas *publicity* dan *public relations* pada masyarakat (Wahyuni, 2019).

Sementara fungsi mengalahkan yang dimiliki media massa terjadi kalau media massa memperkuat control sosial atas anggota-anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang

menurut pandangan masyarakat (Poti, 2016; Zulfebriges, 2003). Media Sosial atau surat kabar misalnya mempublikasi informasi mengenai pelanggaran norma-norma. Fakta-fakta seperti itu sudah seharusnya diketahui oleh anggota-anggota masyarakat tetapi keterbukaan melalui media massa menciptakan kondisi-kondisi sosial di mana orang banyak harus menolak pelanggaran-pelanggaran itu dan mendukung standar-standar moralitas yang sudah umum, dan bukannya bersifat pribadi. Dengan proses seperti ini, berita-berita yang disampaikan melalui media massa memperkuat control sosial di dalam masyarakat perkotaan.

Namun demikian, pengawasan media massa juga bisa memiliki disfungsi secara individual yaitu antara lain bahwa berita-berita mengenai bahaya yang terjadi di lingkungan sekitarnya juga bisa menimbulkan kecemasan dalam diri khalayak (Kusmiati, 2018; Yumiarti & Komalasari, 2020). Sementara, di mana individu yang dibanjiri informasi, akan beraksi dengan kembali kepada hal-hal yang bersifat pribadi atau rahasia. Berita-berita yang disampaikan melalui media massa juga kadang-kadang menimbulkan *apathy* (sikap masa bodoh).

Fungsi korelasi yang meliputi pemilihan, interpretasi dan preskripsi adalah untuk mencegah munculnya konsekuensi-konsekuensi yang tak di inginkan dari-berita-berita yang disampaikan media massa banyak ahli jurnalistik dewasa ini menginterpretasikan kejadian-kejadian dalam konteks sosial dan historis yang lebih.

Aktivitas ini juga bisa memiliki disfungsi pada tingkat masyarakat, misalnya, hal tersebut dapat merintang perubahan sosial dan meningkatkan kompromi selama keadaan itu membatasi fungsi kritik media massa (Kusmiati, 2018). Bagi individu, aktivitas-aktivitas ini dianggap disfungsional jika interpretasi dan pengeditan berita media massa justru melemahkan hak kritik si individu sendiri. Fungsi transmisi budaya media massa mampu bagi masyarakat dan individu sudah jelas yaitu media massa mampu mentransmisi nilai-nilai kultural ini bisa memperkuat budaya yang sudah ada, menciptakan budaya baru atau bahkan secara disfungsional bisa menghancurkan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat (Nida, 2014).

Dewasa ini fungsi media massa yang cukup menonjol adalah fungsi hiburan. Media massa telah menjadi sumber utama hiburan bagi masyarakat dan individu. Namun para kritikus kebudayaan beranggapan bahwa media massa hiburan bisa bersifat disfungsional selama hiburan yang ditampilkan gagal menimbulkan atau menumbuhkan selera publik sampai pada tingkat yang mungkin dicapai oleh bentuk hiburan yang lebih luas melalui media-media sosial (Situmeang, 2015).

McQuail (McQuail, 1987) mengemukakan serangkaian fungsi media massa bagi masyarakat, yakni sebagai Informasi, Korelasi, Kesenambungan, Hiburan, dan Mobilisasi.

Sebagai informasi, media menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia, menunjukkan hubungan kekuasaan, memudahkan inovasi adaptasi dan kemajuan. Sebagai fungsi korelasi, media menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi, menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan, melakukan sosialisasi, mengkoordinasi beberapa kegiatan, membentuk kesepakatan, serta menentukan urutan prioritas dan memberikan status relatif.

Dalam fungsinya sebagai kesinambungan, media mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus serta perkembangan budaya baru, dan meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. Adapun sebagai hiburan, media menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana rekreasi, serta meredakan ketegangan sosial. Sedangkan fungsi mobilisasi, media mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan dan kadang kala juga dalam bidang agama. Sementara fungsi media massa bagi individu menurut McQuail sebagai informasi, identitas pribadi, integrasi dan interaksi sosial, dan hiburan.

Demikianlah bahwa media massa memiliki sejumlah fungsi dan disfungsi tertentu. Di satu sisi media massa memang memiliki fungsi yang positif bagi individu dan masyarakat. Namun di sisi lain media massa juga memiliki disfungsi-disfungsi tertentu. Bergitu pula jika dikaitkan dengan persoalan disintegrasi bangsa, media massa bisa juga membantu proses integrasi dan juga sebaliknya bisa membantu menyuburkan proses disintegrasi bangsa. Namun patut dicatat bahwa media massa bukanlah penyebab utama munculnya disintegrasi bangsa melainkan hanya memiliki potensi untuk memfasilitas proses disintegrasi bangsa.

### **Kecenderungan Media Sentrifugal Versus Sentripetal**

Potensi yang dimiliki media massa untuk memperkuat integrasi dan juga sekaligus memfasilitas proses disintegrasi sangat bergantung pada kecenderungan media (Musbikin, 2021), apakah media cenderung sentrifugal ataukah cenderung sentripetal. Di satu pihak kecenderungan sentrifugal menggugulkan ketegangan, kontrol, persatuan dan keterpaduan (kohesi) (Gunarjo et al., 2013). Kecenderungan media sentrifugal ini banyak dianut oleh filsafat pers liberal. Asumsinya antara lain bahwa media massa senantiasa menampilkan gagasan-gagasan perubahan, kebebasan, keanekaragaman dan fragmentasi. Media massa diberi kebebasan dalam menyajikan nilai-nilai yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai perubahan.

Dalam batas-batas dan kondisi-kondisi tertentu kecenderungan sentrifugal ini terasa menguntungkan. Misalnya, dalam kondisi masyarakat yang mapan dan stabil. Namun dalam

masyarakat yang sedang mengalami transisi seperti Indonesia sekarang ini, pilihan atas kecenderungan sentrifugal yang tak terkendali seperti ini malah bisa meyulut berbagai disintegrasi. Baik disintegrasi geografis maupun disintegrasi fungsional dan normative.

Denis McQuail (McQuail, 1997) mengemukakan bahwa media massa dengan berbagai cara dapat menimbulkan kerusuhan, menciptakan buaday huru har, menyediakan contoh tentang cara menimbulkan dalam tradisi media sentrifugal yang tak terkendali.

Allen dan Seaton (Allen & Seaton, 1999) menyatakan bahwa ada kalanya liputan media massa malah memperkeruh konflik. Mereka antara lain mengemukakan bahwa perang, untuk sebagian, diciptakan oleh media. Begitu pula dalam pengertian bahwa media dapat mengarahkan strategi militer dan mempertajam mempersetujuan. Secara luas istilah “perang dianggap” berasal dari situasi yang diciptakan oleh para wartawan agar terima menurut tingkat tertentu. Seringkali penggunaan istilah masyarakat bahwa pembunuhan, kadangkala pilihan untuk meyebut peristiwa kekerasan sebagai perang memiliki dimensi politis.

Potensi media massa untuk memperkeruh konflik dan menyebar benih-benih disintegrasi bangsa dapat diwujudkan melalui praktek jurnalisme perang yang sekarang banyak dipraktekkan pers kita. Johan Galtung (Galtung & Vincent, 1992), seorang profesor kajian perdamaian, memberikan model ilustrasi yang mencirikan jurnalisme perang, terutama dalam memandang nilai berita yaitu bahwa cerita tentang orang elit dalam negara-negara elit, yang menyangkut kejadian-kejadian untuk dalam kehidupan seseorang adalah nilai berita. Sementara cerita yang berkaitan dengan perubahan struktural, khususnya yang positif, yang menyangkut orang-orang non-elit dalam Negara non-elit, bukanlah cerita.

Lebih jauh lagi, Galtung memberikan banyak kritik tentang jurnalisme perang, yang pada akhirnya merekonstruksi jati diri jurnalisme tersebut, terutama berkaca pada cara kerja pers barat ciri utamanya adalalah segala sesuatu yang berasal dari sumber-sumber resmi dan masuk ke dalam midset. Jurnalisme perang yang menggunakan analisis *a general zero-sum*. Baginya perdamaian didefinisikan sebagai kemenangan plus gencatan senjata. Ia tidak membuka kemungkinan lain bahwa akibat sebuah kejahatan akan menimbulkan konflik yang tak terselesaikan, yang bias meletus kembali di kemudian hari.

Ironisnya, ada kecenderungan media massa sekarang justru menjatuhkan pilihan pada kecenderungan sentrifugal. Media massa malah terserat dalam paham jurnalisme barat yang cenderung bias dan berprasangka dalam menyorot berbagai peristiwa di tanah air. Simak saja misalnya, gaya pemberitaan sejumlah media massa kita saat meliput peristiwa timor-timor. Alih-alih, menyajikan berita secara objektif, media massa kita malah ikut-ikutan sama pers

barat mencitrakan pejuang prointegrasi dan TNI sebagai pesuruh dan pelanggaran HAM di bumi Lorosae.

Di pihak lain, dalam tradisi komunikasi massa juga dikenal kecenderungan media sentripetal. Kecenderungan sentripetal ini berasumsi bahwa media massa mampu menggalang ketenangan, control, persatuan dan keterpaduan (kohesi). Di sini media massa dipandang sebagai salah satu sub sistem yang mampu mengkolerasikan dan memadukan nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru secara profesional. Fokus pemberitaannya diarahkan pada upaya-upaya melanggengkan konformitas dan keteraturan, harmonis, dinamis, dan produktif di masyarakat dengan tujuan integrasi (Nur, 2016). Pendekatan seperti ini tampaknya cukup menjanjikan untuk upaya-upaya meminta kembali benang-benang integrasi bangsa yang sudah mulai kusut.

Kedua konsep tersebut diatas tampaknya amat berbeda. Walaupun demikian dalam kenyataannya kedua kecenderungan tersebut berjalan seiring searah dengan yang lainnya dalam beberapa hal tertentu. Terlepas dari kenyataan itu, upaya untuk menganut kedua kecenderungan itu secara bersamaan atau mengawinkan keduanya tentu bukanlah hal yang mudah. Dengan demikian kita diarahkan untuk memandang hal itu sebagai kecenderungan yang masing-masing memiliki dimensi evaluasi tersendiri. Oleh karena itu, akan terlihat adanya sudut tinjauan teoretis yang berbeda.

Sehubungan dengan konsep media sentripetal, terdapat versi positif yang menekankan media sebagai pengintegrasian (pemersatu, pada dasarnya merupakan pandangan fungsional). Atas dasar kecenderungan inilah sebenarnya media massa memiliki potensi untuk mempersatukan mengintegrasikan kembali bangsa kita yang akhir-akhir ini sedang menghadapi problem disintegrasi yang cukup serius. Namun ada juga versi negatif (Hadi et al., 2021).

Versi positif pandangan media sentrifugal menekankan modernisasi, kemerdekaan, dan mobilisasi sebagai efek yang diharapkan lahir dari adanya peran media (pada umumnya merupakan pandangan individualisme), sedangkan versi negatifnya adalah menekankan isolasi, alienasi, disintegrasi, pengikisan dan kelemahan (Hadi et al., 2021). Versi negative sentrifugal inilah yang diidentifikasi dapat memfasilitasi benih-benih disintegrasi bangsa dewasa ini.

Rosengren (1983) mencoba memadukan kedua sisi positif kecenderungan ini. Hasilnya adalah pendekatan fungsionalisme struktural media massa. Teori fungsionalisme struktural berasumsi bahwa kondisi integrasi merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan suatu sistem social. Tanpa integrasi tak mungkin tercapai kesepakatan dalam menentukan arah dan cara mengakomodasi berbagai tujuan integrasi yang hendak dicapai. Teori ini memandang

media massa menjadi salah satu sistem yang mampu mendukung kondisi integrasi tersebut. Baik integrasi fungsional maupun integrasi normative sangat diperlukan dan media massa memiliki potensi untuk memperkuat hal itu.

Wujud dukungan tersebut menurut McQuail (1994) bisa berupa penghindaran penghindaran kritik yang berlebih-lebihan terhadap institusi-institusi atau dalam masyarakat seperti dunia usaha yang sangat fundamental, komunitas, agama dan keluarga, pembelian imbalan simbolik kepada mereka yang berhasil dengan kerja keras dan cara yang dipandang baik serta pemberian sanksi simbolik kepada mereka yang dianggap gagal dan menyimpang. Penyajian berita tentang berbagai penyimpanan dan kekerasan dalam masyarakat diarahkan pada upaya memberi peringatan dan pencegahan.

### **Jurnalisme Perdamaian**

Salah satu wujud praktek media massa yang sejalan pendekatan struktural fungsional ini adalah penerapan jurnalisme perdamaian. Praktek jurnalisme perdamaian tampaknya sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang sementara menghadaoi berbagai proses disintegrasi, bukan hanya disintegrasi social, politik, ekonomi, dari struktural.

Johan Galtung datang dengan strategi jurnalisme perdamaian pertama dan dikembangkan oleh Jake Lynch dan McGoldrick (Angjaya et al., 2018; Nugroho, 2018). Dia adalah seorang profesor studi perdamaian yang menyesalkan bagaimana media meliput perang di masa lalu. Dia menegaskan bahwa media dapat dianggap sebagai penjual konflik. Di antara berbagai pengelompokan tersebut, media tertarik pada independensi serta kepentingan ekonomi dan politik (Sukma Alam, 2020).

Jurnalisme perdamaian ini sebenarnya lahir dari kesadaran terhadap akses negative dari jurnalisme kekerasan yang selama ini dipraktekan oleh pers barat yang cenderung deskriminatif dan mengadu domba pihak-pihak yang bertingkai serta mendorong terciptanya berbagai proses disentrigrasi. Pertanyaan kritis tentang keuntungan menggunakan kekerasan dalam konflik adalah dasar dari jurnalisme perdamaian (Isma, 2019). Tugas utama jurnalisme perdamaian adalah berupaya memetakan konflik, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan menganalisis tujuan-tujuan mereka dan membicarakan informasi yang mereka sediakan dalam agenda khusus.

Dengan situasi konflik seperti itu, jurnalisme perdamaian harus mencari tahu suara yang berbeda dan mengartikulasikan luasnya kepentingan dalam situasi sebelumnya. Hal ini untuk menyangkal polarisasi menjelek-jelekan dan pembagusan dalam jurnalisme perang.



Karya-karya jurnanisme yang mengagumkan seperti ini mempunyai efek memanusiakan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik.

Menurut Johan Galtung, jurnanisme perdamaian adalah jurnanisme yang menjunjung tinggi kebenaran, menentang propaganda dan kebohongan, serta mempertimbangkan kebenaran. Prinsip-prinsip jurnanisme damai memiliki empat orientasi: orientasi perdamaian, orientasi kebenaran, orientasi masyarakat, dan orientasi resolusi (Amelia & Sukartik, 2022). Jurnalisme perdamaian biasanya berorientasi pada perdamaian secara proaktif mencegah sebelum terjadinya konflik atau perang dan kekerasan serta berempati memberikan pengertian kepada semua pihak yang bertikai. Jurnalisme perdamaian senantiasa berorientasi pada kebenaran dan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan membeberkan berbagai penderitaan yang dialami semua pihak, wanita anak-anak dan orang tua akibat konflik dan senantiasa mengedepankan upaya-upaya perdamaian.

Hal ini bukan berarti bahwa fungsi control pers akan terabaikan. Control social media massa dalam kerangka sistem sebenarnya bukanlah masalah. Yang jadi masalah justru bagaimana pelaksanaan control media massa itu sendiri. Media massa sebagai bagian dari sistem social secara umum akan senantiasa memberikan kontrolnya dan sebaliknya juga dikontrol oleh nilai-nilai social yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa media masa juga harus mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam sistem di mana ia berada. Kebebasan media massa tetap dibatasi oleh kebebasan subsistem-subsistem yang lain. Batas-batas kebebasan masing-masing di antara komponen-komponen sistem harus saling dijaga dan ditaati, karena pelanggaran atas kebebasan ini akan menimbulkan disharmoni atau disintegrasi sistem.

Sedikitnya ada dua jenis pengendalian informasi, yaitu *control feedback* dan *control distribusi*, yang dilakukan oleh media massa itu sendiri sebagai bagian dari fungsi pemeliharaan system (Husain, 2011). Untuk memberikan umpan balik atau pengaturan ke subsistem lain atau keseluruhan sistem, digunakan media dalam *control feedback*. Ketika norma sosial mulai menyimpang, ia bertindak sebagai pengatur, sistem peringatan dini, atau korektor. Ini memberikan tekanan korektif pada subsistem yang mungkin tidak beroperasi dalam harmoni fungsional dengan subsistem lainnya (Husain, 2011).

Dalam perspektif ini, maka pengukapan skandal, korupsi, kolusi dan berita-berita tentang gerakan aceh merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh media massa hendaknya dilakukan dalam fungsi pemeliharaan sistem itu sendiri. Hal ini hendaknya jangan hanya dipandang semata-mata sebagai upaya memenuhi kepentingan dan kegembiraan sensasi media massa melainkan sebagai penerapan norma-norma social yang dominan kepada

pihak-pihak, lembaga –lembaga dan kelompok-kelompok sosial yang baru, yang masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam struktur social bersangkutan.

Dalam control distribusi, yang dapat terjadi secara sendiri maupun secara bersamaan dengan control *feedback*, media massa melakukan fungsi pemeliharaan sitem melalui penyebaran berita secara selektif dengan menggunakan berbagai teknik peliputan, pengemasan dan penyajian berita. Dalam situasi dan kondisi bangsa yang tercabik-cabik seperti sekarang ini media massa sebagai salah satu komponen yang cukup penting tentunya diharapkan selalu mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan pribadi atau kepentingan bisnis dan politis.

Meskipun suatu peristiwa atau kejadian memang mengandung nilai berita yang cukup tinggi dan sangat menguntungkan secara bisnis tetapi diperkirakan hanya akan mengandung perpecahan atau menyebar benih-benih disintegrasi, maka sebaiknya berita seperti itu ditanggihkan saja.

Dalam situasi bangsa menghadapi bahaya disintegrasi seperti sekarang inilah tanggung jawab media massa sangat dibutuhkan sekali. Masalah yang ditimbulkan disintegrasi bangsa bukan hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat pertikaian secara langsung tetapi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai satu kesatuan nusantara yang tersebar dari sabang samapi merauke tentu hanya akan menjadi kenangan saja.

Saatnya kini kebebasan yang dimiliki media massa hendaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penanaman kembali nilai-nilai persatuan dalam kesatuan yang kian mundur. Pentingnya penanaman kembali nilai-nilai dan semangat kebangsaan bersifat imperative kerna berfungsi sebagai alat perekat persatuan dan kesatuan nasional serta bisa menjadi peredam konflik kepentingan yang hanya akan merusak norma-normarelasional sesama bangsa Indonesia. Sekarang merupakan momen yang paling tepat bagi media massa untuk membuktikan kecintaanya terhadap bangsa dan tanah airnya. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan media massa siapa lagi yang akan melopori semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang tercinta ini.

#### 4. KESIMPULAN

Peran media massa dalam wacana disintegrasi bangsa dewasa ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi media massa mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan (integrasi) bangsa, namun di sisi lain media massa mampu memfasilitasi proses disintegrasi bangsa. Kemampuan media massa untuk memperkokoh integrasi atau disintegrasi sangat ditentukan oleh kecenderungan sentrifugal atau sentripetal media massa dalam prakteknya sehari-hari. Kalau

media massa cenderung sentrifugal, maka ia akan mempercepat proses disintegrasi. Sebaliknya kalau media massa cenderung sentripetal maka ia mampu menjadi perekat dan memperkokoh kembali integrasi bangsa yang sekarang sudah tercabik-cabik. Untuk itu di sarankan media massa dalam aktivitasnya mencari, mengumpulkan, mengemas dan menyajikan sebagai berita konflik dan perpecahan di tanah air hendaknya mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme perdamaian dan kedamaian

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, T., & Seaton, J. (1999). *Introduction*. In T. Allen & J. Seaton (Eds.), *The media of conflict*. Zed Books.
- Amelia, U. S., & Sukartik, D. (2022). Penerapan jurnalisme damai dalam pemberitaan kudeta Myanmar di media online Kompas.com. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v4i1.18498>
- Angjaya, S. V., Susanto, E. H., & Siswoko, K. H. (2018). Jurnalisme damai pemberitaan tragedi Bom Surabaya Mei 2018 (Analisis wacana media siber Kompas.com, Okezone.com, Liputan6.com). *Koneksi*, 2(2), 562–568. <https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3937>
- Arisaputra, M. I. (2021). *Reforma agraria di Indonesia* (M. Sari, Ed.; Digital).
- Cangara, H. (2009). *Pengantar ilmu komunikasi* (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Fitriawan, R. A. (2017). Jurnalisme sains dan sistem peringatan dini di Indonesia. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1).
- Galtung, J., & Vincent, R. C. (1992). *Global glasnost: Toward a new world information and communication order?* Hampton Press.
- Gunarjo, N., Prajarto, Y. A. N., & Herianto, A. S. (2013). Dilema pers birokratik di era demokratisasi: Studi kasus Tabloid Komunika Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Jurnal Kawistara*, 3(1), 79–93. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3963>
- Hadi, I. P., Wahyjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2021). *Komunikasi massa*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Haryati, H. (2003). Sikap pers terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 4(1), 41–48.
- Hendra, T. (2019). Media massa dalam komunikasi pembangunan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1, 136–152.
- Husain, W. (2011). Kontrol sosial Harian Palopo Pos dalam mewujudkan good governance di Luwu. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(3), 283–296.

- Isma, A. (2019). Pengembangan keilmuan Program Studi Jurnalistik Islam melalui mata kuliah peace journalism. *Jurnal Dakwah Risalah*, 30(1), 47–60. <https://doi.org/10.24014/jdr.v30i1.6450>
- Kadarisman, M. (2010). Faktor geografi dalam mencegah disintegrasi bangsa (Upaya mempertahankan nasionalisme Indonesia). *Sociae Polites*, 11(30), 39–52.
- Kusmiati, Y. (2018). Warisan sosial sebagai salah satu fungsi komunikasi massa: Sebuah tinjauan komunikasi Islam. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 339–344.
- McQuail, D. (1987). *Mass communication theory: An introduction*. Sage Publications.
- McQuail, D. (1997). *Audience analysis*. Sage Publications.
- Muhazir, A. (2021). *Komunikasi politik: Demokrasi, media massa, dan pemilihan umum di Indonesia*. Zahira Media Publisher.
- Musbikin, I. (2021). *Penguatan karakter gemar membaca, integritas dan rasa ingin tahu*. Nusa Media.
- Namira, S., & Nuraeni, R. (2017). Fungsi televisi lokal sebagai media pelestarian budaya (Studi kasus program acara Kandaga di stasiun televisi lokal TVRI Jawa Barat sebagai media pelestarian budaya masyarakat Jawa Barat). *E-Proceeding of Management*, 4(3), 3084–3091.
- Nasution, Z. (2007). Bahasa sebagai alat komunikasi politik dalam rangka mempertahankan kekuasaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 445–464.
- Nida, F. L. K. (2014). Persuasi dalam media komunikasi massa. *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 2(2), 77–95.
- Nugroho, R. P. (2018). *Penerapan jurnalisme damai dalam pemberitaan (Analisis isi kuantitatif terhadap pemberitaan konflik Rohingya di Kompas.com dan Detik.com periode Agustus 2017-Oktobre 2017)* [Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta].
- Nur, E. (2016). Tanggapan masyarakat terhadap pemberitaan media Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 17(2), 113–126.
- Poti, J. (2016). Demokratisasi media massa, relasi kuasa negara, masyarakat dan pemilik media. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 78.
- Situmeang, I. V. O. (2015). *Modul komunikasi massa*.
- Sukma Alam. (2020). Jurnalisme damai dalam pembedaan berita rasisme mahasiswa Papua di Tribunnews.com dan Detik.com. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(2), 121–136.
- Supriyanto, Y. (2011). Peran komunikasi politik pemerintah dalam. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–11.
- Umar, B. W. (2017). Polisi dalam arus radikalisme, intoleransi, dan disintegrasi bangsa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2), 51–57.

- Wahyuni, A. (2019). *Peranan produser dalam meningkatkan kinerja news anchor pada program acara Kompas SUMUT di Kompas TV Medan* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Yumiarti, Y., & Komalasari, B. (2020). Pemanfaatan internet dan agenda setting media massa. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*5, 5(1), 69–88.
- Zulfebriges. (2003). Teori media-Marxist: Sebuah pengantar. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 4(1), 79–90.